

Literature Study Of The Role Of Regional Owned Enterprises (BUMD) In Supporting The Economy In The Middle Of The Covid-19 Pandemic

Studi Literatur Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mengangkat Perekonomian Ditengah Pandemi Covid19

Kumba Digdowiseiso^{1*}, Ammylia Rengganisa²

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional^{1,2}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Writing this article aims to determine the role of Regional-Owned Enterprises (BUMD) in lifting the economy amid the COVID-19 Pandemic. In essence, State-Owned Enterprises (BUMD) were formed with the aim of providing benefits for regional economic development in general and meeting community needs with the achievement of profits, financially which can increase Local Original Income. The Covid-pandemic caused economic shocks leading to a global recession. Various policies were carried out to emphasize the spread of Covi-19, such as closing schools and some business activities, large-scale social restrictions, and even lockdowns which resulted in a decrease in the level of consumption and investment. The government, through the Ministry of BUMN, took strategic steps to improve the economy in the midst of the Covid 19 pandemic, namely Economy and Social Affairs for Indonesia, Business Model Innovation, technology leadership, Asset Optimization, Talent Pool.

Keywords: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Micro small and Medium Enterprises (UMKM)

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha milik Daerah (BUMD) dalam pengangkat perekonomian ditengah Pandemi Covid 19. Yang pada hakekatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dibentuk dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian keuntungan finansial yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah. Pandemi Covid- menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan dilakukan untuk menekankan penyebaran covi-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan social berskala besar, bahkan lockdown yang mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengambil langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian pditengah Pandemi Covid 19 yaitu Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, kepemimpinan teknologi, Optimalisasi Asset, Talent Pool.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMD), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pendahuluan

Dampak dari Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan diberlakukannya beberapa kebijakan tentang pembatasan kegiatan manusia dengan tujuan untuk menghentikan dan menghambat penyebaran virus namun memiliki dampak pada kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan lemahnya kinerja ekonomi. Salah satunya terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat dan menghambat produksi dan distribusi barang.

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi suatu daerah yang bersumber dari hasil Badan Usaha milik Daerah (BUMD) sebenarnya telah berjalan sejak lama. Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sendiri dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui

pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMD) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dapat meningkatkan kinerja dan layanannya dalam membangun daerah, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Sejalan dengan Program Presiden Joko Widodo dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut sangat perlu karena membantu masyarakat menengah kebawah dalam hal meningkatkan perekonomian yang di dukung oleh BUMD yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi.

Laporan Perekonomian Indonesia 2020 dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi regional tertinggi di tahun 2019 ada di Sulawesi (6,66%). Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di tahun 2019 ada di Maluku dan Papua (-7,40%). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2019 sebesar 5,02% dengan pendapatan per kapita sebesar 57,3 juta rupiah (USD 4.050). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2019 menjadi pertumbuhan ekonomi yang terendah selama empat tahun terakhir, yang tidak terlepas dari kondisi perlambatan ekonomi dunia. Jika dilihat dari sisi penggunaan, komponen yang dihitung meliputi komponen pengeluaran domestic (konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan konsumsi pemerintah), pengeluaran investasi serta komponen ekspor dan impor terjadi penurunan.

Pandemi Covid-19 telah membahwa perekonomian nasional dna global kearah resesi ekonomi, yang ditandai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II Tahun 2020 sebesar -5,32%. Yang terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan social untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada triwulan II Tahun 2020 (Q-to-Q): mengalami kontraksi sebesar -4,19% dimana ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,32% secara keseluruhan. Konsumsi Rumah Tangga sendiri mengalami penurunan 06,51%. Fenomena yang terjadi adalah Penjualan eceran mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman dan tembakau; sandag; perelengkapan rumah tangga lainnya; bahan bakar kendaraan; barang budaya dan rekreasi; serta barang lainnya. Penjualan wholesale mobil penumpang dan sepeda motor terkontraksi. Jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara terkontraksi. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit terkontraksi. Volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa pendapatan pendidikan tumbuh melambat dibanding Triwulan II 2019.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Pemerintah berusaha meningkatkan performance ekonomi nasional salah satunya dengan melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari 3 (tiga) kebijakan utama yaitu: Peningkatan Konsumsi Dalam Negeri (Demand), Peningkatan Aktivitas

Dunasia Usaha (Supply), serta menjaga Stabilitas Ekonomi dan Ekpanasi Moneter. Dimana ketiga kebijakan tersebut harus mendapat dukungan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN/BUMD, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terpukul yang juga menggerek turunya perekonomian nasional. Bisa dphami bahwa UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Salah satu dari sasaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah menggerakkan UMKM, dengan kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan, dengan dana yang dialokasikan sebesar 123,46 Triliun.

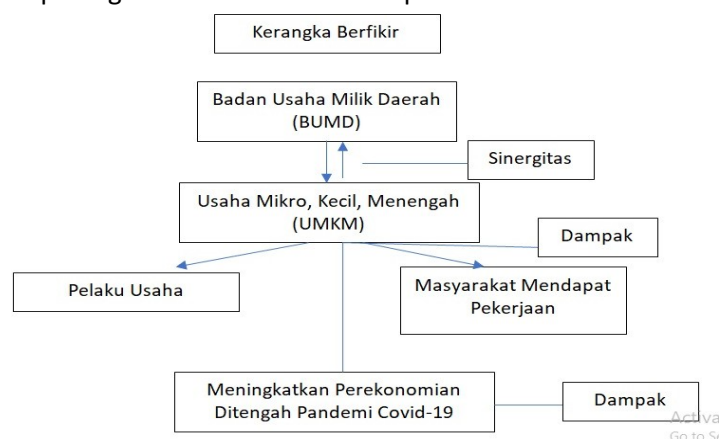
Pemerintah membahas 5 (lima) Skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dimana pada program kelimanya menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) sebagai buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, berikut ini dalam artikel yang akan dibahas lebih lanjut secara ringkas tentang: Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dalam mengangkat Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Literature review dengan oendekatan kualitatif. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif adalah analisis data yang menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014;14). Alasan dari penulis menggunakan model tersebut adalah karena analesisi model interaktif ini tepat diterapkan sesuai judul artikel tersebut. Menurut Miles, Hubernman dan Saldana (2014;14), analisis terdiri dari empat alur yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengangkat Perekonomian di tengah pandemic Codd-19 yang dibahas secara general.

Locus dari artikel ini adalah gambaran perekonomian secara nasional dengan membahasa data dari Badan Pusat Statistik terkait Produk Domestik Bruto pada Triwulan ke II Tahun 2020. Dimana perekonomian pada saat tersebut mengalami gonjangan yang cukup kuat akibat pandemic covid-19 yang melanda hamper diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang terpukul oleh pandemic tersebut. Objek ini berfokus pada peran BUMD sendiri yang menjadi lokomotif perekonomian di Indonesia pada saat menghadapi Pandemi covid-19 ini. Pandemi ini berdampak besar pada segala sektor ekonomi, termasuk UMKM. Peran BUMD ini sangat penting karena diharapkan dapat mengajak dengan membangun sinergitas antara BUMD dengan UMKM untuk peningkatan Ekonomi di masa pandemic covid 19 ini.

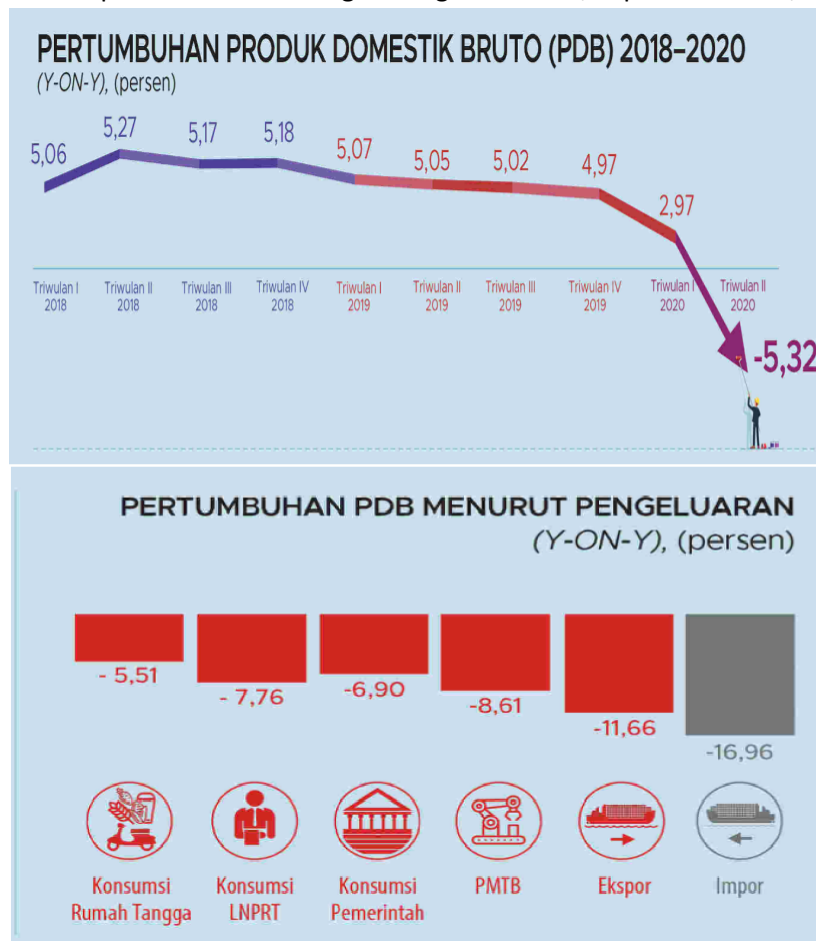


Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Penulisan artikel ini menggunakan pencarian literatur baik internasional maupun nasional dengan menggunakan database googlescholar. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh sekitar 6540 artikel dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan kata kunci “Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan UMKM”. Dari sejumlah tersebut hanya ada sekitar 3 Artikel yang dianggap relevan. Sehingga penulis mengambil tema dalam artikel ini yaitu “Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Mengangkat Perekonomian ditengah Pandemi Covid-19”.

3. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) 2018-2020 Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

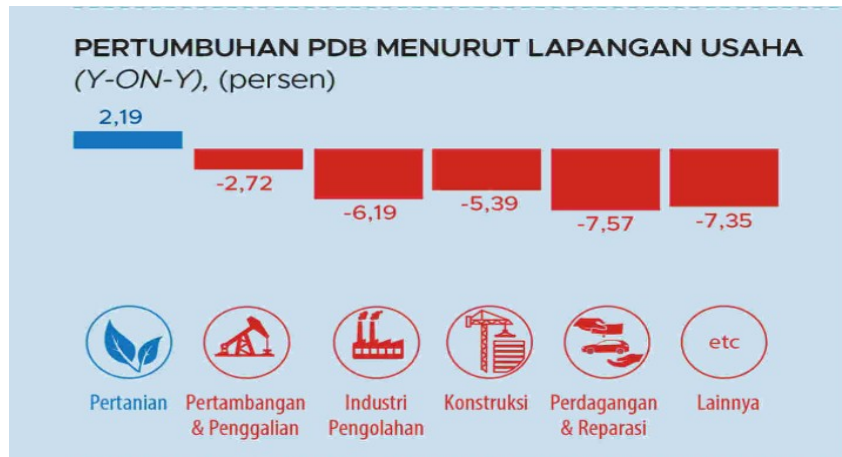


Gambar 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua

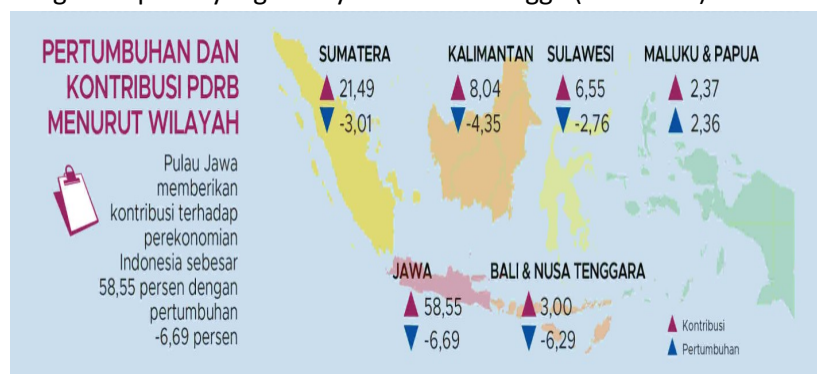
mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.



Gambar 4. Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen. Ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen berkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44%



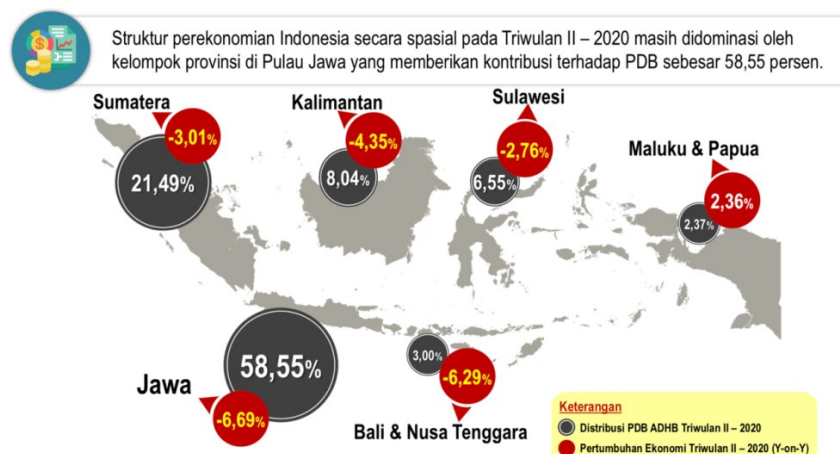
Gambar 5. Pertumbuhan PDRB menurut Wilayah

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dari data-data tersebut diatas menggambarkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dimana menurun sebesar -5,32 persen dari triwulan I Tahun 2020. Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha rata-rata -4 persen sedangkan pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran -8 persen.

Secara spasial dapat digambarkan struktur perekonomian pada Triwulan II 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,55 persen, meskipun sudah mengalami penurunan sebesar -6,69 persen dari triwulan sebelumnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020



Gambar 6. Struktur Perekonomian Indonesia

Transformasi bidang perekonomian menjadikan BUMN menjadi lokomotif baru perekonomian nasional. Dengan mengawal penerapan teknologi dan informasi komunikasi di tengah beraktifitas, menjaga pertumbuhan bisnis logistic dan transportasi sebagai dampak dari terbatasnya pertemuan fisik dan menerapkan otomatisasi/robotisasi di tempat kerja. Kementerian BUMN mengartikan lima Langkah Prioritas yang tertuang dalam roadmap BUMN 2020-2024 yaitu yang pertama adalah nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang merupakan komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekonomi dan dampak social masyarakat Indonesia yang terutama dituju di bidang ketahanan pangan, energi dan Kesehatan.

Yang kedua adalah Inovasi Model Bisnis yaitu adanya restrukturisasi model bisnis yang dikembangkan melalui pembangunan ekosistem, Kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders dan focus core business. Yang Ketiga adalah kepemimpinan teknologi. Yang mana diharapkan pelaku bisnis membuat lebih banyak terobosan di era teknologi dengan memanfaatkan data management, advanced management, big data, artificial intelligence dll.

Keempat adalah mendorong BUMN untuk mengoptimalkan nilai asset dan menciptakan ekosistem investasi yang sesehat-sehatnya. Dimana dengan mengoptimalkan produktivitas asset-aset fisik, misalnya lahan, Gedung, barang, serta asset-aset non fisik seperti data konsumen pada BUMN. Yang terakhir adalah Pengembangan talenta (Talent Pool) dengan tujuan untuk memperkaya pengalaman bekerja dalam lingkungan bisnis, sehingga pegawai memiliki pengalaman dan pengetahuan baru akan menambah keahlian dan kompetensi.

Roadmap BUMN tersebut merupakan rencana Kerjasama bisnis antara perusahaan BUMN, BUMD dan BUMDes yang diintroduksi dingah lingkungan bisnis yang sehat dan terus berkembang, meljulah sebuah rangkaian kereta bernama Indonesian Incorporation yang bermesin utama Lokomotif BUMN dan menarik sejumlah gerbong eksekutif milik swasta, BUMD serta BUMDes.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.) yang menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya, dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan juga bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan. Kedua pengaturan di atas tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD.

Fungsi BUMD sendiri adalah sebagai fasilitator dalam kaitannya menjalankan otonomi daerah, yang memiliki fungsi membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya

yang berlandaskan otonomi daerah. Sebagai suatu daerah yang otonom, pemerintah daerah diharuskan untuk mampu membiayai anggaran rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu bentuknya asset daerah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, yang pada akhirnya akan diberikan Sebagian kepada pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi harapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menunjang perekonomian daerah. Laba BUMD sendiri dapat menambah Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing di BUMD tersebut. Terdapat sejumlah 795 Perusahaan milik Pemerintah Provinsi dan Perusahaan milik pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 691 perusahaan.

Menuut Data Statistik BUMD Tahun 2019, keberadaan BUMD menjadi harapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menunjang perekonomian daerah. Pada tahun 2019 perusahaan BUMD berjumlah 818 perusahaan. Perkembangan BUMD menurut Kepemilikan Saham terbesar pada tahun 2016-2019 digambarkan bahwa Pada tahun 2016 sejumlah 782 Persahaan dan naik menjadi 818 perusahaan pada tahun 2017, serta bertambah lagi pata tahun 2018 sejumlah 825 dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 818 perusahaan.

Gerakan dukungan UMKM di Indonesia direspon baik oleh pelaku bisnis khususnya bagi wirausaha muda atau home industry. UU Nomor 20 Tahun 2008 menjadi payung hukum UMKM sehingga memiliki landasan yang kuat dan menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan saat yang dihadapi UMKM saat ini adalah dengan menghasilkan inovasi dan layanan untuk dapat terus bertahan di pasar local dan bisa juga bersaing di pasar internasional.

Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia meliputi: Sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil; sarana mengentaskan kemiskinan; sarana pemasukan devisa bagi negara. Dimana sarana-sarana tersebut mampu menjangkau seluruh pelosok, bahkan menjadikan banyak penyerapan tenaga kerja serta bisa menjangkai pasar internainal sebagai bentuk pemasukan bagi negara. Pada tahun 2016 sendiri UKM Indonesia berdasarkan Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik tercatat bahwa UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja; menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja; menyumbang 60,34% dari total PDB Nasional dan menyumbang 14,17% dari total ekspor; dan menyumbang 58,18% dari total investasi. Dimana terdapat 3 Bidang Usaha yang menempati urutan teratas yaitu: Perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; industry pengolahan.

Pada Tahun 2018 sejumlah 64.17 Juta Usaha dengan tenaga kerja UMKM sebesar 117 juta pekerja, dimana sumbangan UMKM terhadap PDB tahun 2018 sebesar 8.573 Triliun. Jelas Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, Pemebentuk Produk Domestik Bruto (PDB) serta sumber ekspor nonmigas. Kekuatan UMKM sentiri tidak terlepas dari perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestic dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primet masyarakat.

Pandemi covid yang memicu sentiment negative bagi bisnis UMKM menghambat pertumbuhan bisnis UMKM. Para pelaku UMKM dihadapkan dengan kondisi demana harus berfikir untuk menghasilkan berbagai ide kreatif, meningkatkan keahlian dan keterampilan serta kemampuan untuk bisa masuk dalam pasar online maupun offline. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan dari cara pelaku UMKM memasarkan produknya agar bisa bersaing dipasaran. Dengan pengembangan bisnis UMKM berhasil digital memudahkan untuk bisa diakses oleh siapapun bahkan sampai pelosok daerah manapun. Serta menjangkau pasar dalam dan luar negeri.

Asian Development bank (ADB) merilis hasil survei dengan judul *“Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence FROM THE Rapid Survei”* yang bertujuan untuk mengetahui kondisi UMKM, Lapangan kerja, Upah, Fiskal dan pembiayaan, berdasarkan sektor dan wilayah, selama dua bulan pertama terjadi pandemic Covid-19 yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Dari sisi operasional usaha menunjukan hasil sebesar 20,5% UMKM di Indonesia menhadapi responden mengalami penurunan permintaan domestik. Dengan yang menjadi perhatian serius adalah terhadap 48.6% UMKM yang harus tutup sementara akibat pandemic. Dalam hal pendapatan, terdapat 38,8% responden mengatakan kehilangan pendapatannya (akbita tutup sementara), sementara 37% responden mengalami penurunan pendapat diatas 30%. Dari sisi tenaga kerja sekitar 60% melakukan pengurangan karyawan.

Berbagai upaya pemerintah untuk mendorong dan memotivasi berbagai pelaku usaha dalam hal ini UMKM melalui beberapa jenis pelatihan, platform kreasi, fasilitasi dan kolaborasi pengembangan UMKM, yang tergambar pada gambar diatas bahwa UMKM sangat membantu dalam menopang perekonomian nasional.

4. Penutup Kesimpulan

Dengan pengelolaan secara profesional sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, BUMD yang adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penghasil PAD akan menghasilkan secara maksimal. Pada Tahun 2019 terdapat 1097 BUMD, dimana hanya 892 BUMD.

BUMD dapat diandalkan sebagai penggerak ekonomi rakyat di tengah pandemic covid 19. Dimana bisa menciptakan iklim kerja baru yang berbasis teknologi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat dan efisien. UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia yang terus meningkat sekitar 60% di masa pra pandemic, dengan penyerapan tenaga kerja sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99%-97.22% dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. UMKM dapat menjadi garda terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, sosial dan lingkungan pada operasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018. PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB.

Momentum yang baik dilakukan oleh Perusahaan Negara berplat merah mengajak berbagai sektor UMKM untuk mengangkat potensinya. Salahsatunya melalui program-program yang dilaksanakan BUMN serta BUMD yaitu mengajak masyarakat sebagai wirausahawan kecil dan mikro agar mendapatkan kesempatan mengembangkan bisnis terutama untuk menembus pasar yang lebih luas.

Terbukti bahwa sinergita antara BUMD dengan UMKM yang sama-sama memiliki hubungan serta peran yang strategis untuk menopang kebangkitan ekonomi ditengah pandemic covid-19. BUMD pun sadar bahwa pemilihan dan mengangkat ekonomi dari tingkat paling bawah berhak mendapat perhatian dimana keluarga merupakan garda terdepan perekonomian dan UMKM merupakan tiang dalam menahan tekanan dampak Covid-19.

BUMD sangat besar perannya terhadap perekonomian daerah masing-masing. Yang bis.dibagi dalam 2 (dua) peran yaitu penugasan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai sektor sekaligus memnuhi ekonomi dan bisnis dari kegiatan yang dilakukan. BUMD sendiri menjadi economic driver untuk menciptakan lapangan kerja menyediakan transportasi murah dengan teknologi terkini, menyediakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah telah memberikan berbagai peluang melalui BMUD dalam menjalankan usahanya seperti yang telah tertera dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Karena salah satu tujuan dari Program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 83% pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa terbantu atas berbagai program dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini. Kementerian Keuangan pun memberikan subsidi bunga, insentif pajak penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja.

Daftar Pustaka

- Data UMKM. Diakses melalui <http://www.depkop.go.id>
- Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020> Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia. Diakses melalui <https://kompaspedia.kompas.id/>
- Survei Asian Development Bank (ADB). Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence From the Rapid Surveys. <https://aceh.tribunnews.com/2020/>
- UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020>
- Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020. Diakses melalui <https://www.bps.go.id>